

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses krusial dalam kebijakan publik. Kebijakan yang melibatkan banyak aktor di dalamnya memiliki kemungkinan untuk mengalami kesulitan dalam proses implementasinya, hal ini dikaenakan terjadi benturan kepentingan antar aktor dalam kebijakan tersebut. Karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil tema kemitraan antar aktor *governance* yakni pemerintah, *civil society* dan sektor privat dalam implementasi kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana bentuk kemitraan antara aktor-aktor *governance* dan bagaimana implikasinya pada implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan tentang KTR dan KTM di Kota Surabaya. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dan lokasi dari penelitian ini adalah Kota Surabaya sebagai lokus diterapkannya perda KTR dan KTM dengan Dinas Kesehatan sebagai koordinator utama dalam proses implementasinya.

Analisis data yang ditemukan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan penelitian dengan menggunakan analisis teori model kebijakan dari Merilee S.Grindle yang didalamnya menggambarkan bagaimana perilaku para aktor dalam sebuah kebijakan. Hasil analisis data yang dihasilkan menunjukkan bahwa dalam implementasi perda KTR dan KTM di kota Surabaya ini terdiri dari dua bentuk yaitu kemitraan dalam bentuk penyediaan sarana fisik dan non fisik. Dan aktor-aktor yang terlibat dalam kemitraan ini telah mneunjukkan peranan dan partisipasi yang baik dalam implementasi perda KTR dan KTM. Selain mengenai kemitraan, hasil penelitian lainnya adalah mengenai implementasi kebijakan perda KTR dan KTM yang hingga saat ini belum maksimal dikarenakan adanya faktor kepentingan aktor yang terlibat, ketersediaan sumberdaya yang kurang, kepatuhan masyarakat dan konsistensi dari pelaksana kebijakan.

Kata Kunci :

Kemitraan, *Governance*, Implementasi Kebijakan, Perda KTR dan KTM

ABSTRACT

Implementation are one of the most crucial steps on public policy process. Policy which have too many actors inside have big probabilitly fo have difficulties for the process of implementation, it's because there is too many interests which had influenced the policy. And because of the fact, in this research, theme of partnership between governance actors include governance, civil society and private sector had taken by researches for main theme for these research. The aim of this research are to describe the shape of partnership between government, civil society and private sector in policy implementation process and the implications either for the policy implementation for smoking regulation in Surabaya. This research was used qualitative and descriptive method and oculus of the research is Surabaya which is Dinas Kesehatan roled as main actor for the coordinator of implementation process.

Researcher used the theory of models Implementation from Merilee Grindle which describe the action of the policy actors for analysed the data research. The results from analysed data are showed that inside of the implementation smoking regulation policy in Surabaya had found that there are two shapes of pertnership for implementation of smoking regulation in Surabaya : Partnership for penyediaan sarana fisik dan partnership for penyediaan sarana non fisik. The result of this research also showed that the governance actors have weel behaved and good participation for the implementation of smoking regulation in Surabaya. Beside that results, another result is about the smoking regulation itself were unsuccessfully implemented until now. It's because four main problems, there are : interests of policy actors, lack of policy resources, lack obedient of target groups and unconsistences of policy implementor.

Keywords :

Partnership, Governance, Policy implementation, Smoking regulation